

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Jumat, 21 Desember 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 19)	Jumat, 21 Desember 2018	Proyek Rp 108 Triliun Dipromosikan ke Swasta	Sebanyak 39 proyek infrastruktur ini digarap dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah terus menggenjot proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha.
2	Koran Tempo (Halaman, 31)	Jumat, 21 Desember 2018	Proyek Pengurai Macet Bekasi Terhambat Infrastruktur Nasional	Dua proyek untuk mengurai kemacetan di Kota Bekasi terpaksa tak bisa segera dibangun karena mesti menunggu pengerjaan proyek strategis nasional milik pemerintah pusat tuntas.
3	Kompas (Halaman Utama)	Jumat, 21 Desember 2018	Geliat Ekonomi Kian Merata	Tol Trans Jawa dipastikan menumbuhkan ekonomi daerah. Saat libur panjang hari raya besar keagamaan, pemudik akan menggerakkan ekonomi daerah-daerah yang terlewati.
4	Kompas (Halaman, 17)	Jumat, 21 Desember 2018	25 Bank Penyalur flpp Capai Target	Pemerintah telah mengevaluasi kinerja bank-bank pelaksana penyalur kredit rumah subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, Hasilnya dari 43 bank pelaksana FLPP tahun 2018, 25 bank di antaranya akan kembali menyalurkan FLPP tahun 2019.
5	Kompas (Halaman, 21)	Jumat, 21 Desember 2018	Berita Foto	Tol Trans Jawa
6	Media Indonesia (Halaman, 11)	Jumat, 21 Desember 2018	Langkah Koreksi Menuju Pemulihan DAS	Langkah koreksi dilakukan karena RHL bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari persoalan besar berupa kerusakan DAS.
7	Media Indonesia (Halaman Utama)	Jumat, 21 Desember 2018	Tol Trans-Jawa Pacu Ekonomi	Tersambungnya Tol Trans Jawa dari Merak ke Surabaya bahkan hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah di dekat jalur bebas hambatan tersebut.
8	Media Indonesia (Halaman, 15)	Jumat, 21 Desember 2018	Tol Trans – Jawa Tidak akan bebani Pengusaha Logistik	Tol Trans Jawa kemarin telah resmi tersambung dari Merak, Jawa Barat, hingga Pasuruan, Jawa Timur. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto memastikan akan ada penyesuaian tarif bagi angkutan logistic yang melintasi tol dengan jarak tempuh yang panjang.

Judul	Proyek Rp 108 Triliun Dipromosikan ke Swasta	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 19)		
Resume	Sebanyak 39 proyek infrastruktur ini digarap dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah terus menggenjot proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha.		



Proyek pembangunan infrastruktur di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Senin lalu.

Proyek Rp 108 Triliun Dipromosikan ke Swasta

Sebanyak 39 proyek infrastruktur ini digarap dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Larissa Huda
larissa.huda@gmail.com

JAKARTA — Pemerintah terus menggenjot proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ikmal Lukman, menuturkan, hingga saat ini, proyek yang akan dibiayai lewat skema tersebut berjumlah 52 proyek. Sebanyak 13 proyek dengan nilai Rp 124 triliun kini sudah dimulai dan sedang dalam tahap konstruksi hingga operasi.

Menurut Ikmal, sisa 39 proyek akan digenjot tahun depan, dan kini dalam tahap persiapan. BKPM mencatat total proyek yang sedang dipromosikan tersebut senilai Rp 108 triliun. "Nanti akan ada tambahan proyek-proyek yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Saat ini masih

tahap *assessment*," ujarnya, kemarin.

Dia memaparkan, sebenarnya lima proyek telah melalui proses *lelang* dan *financial close*. Persiapan konstruksinya juga telah dimulai. Lima proyek itu adalah Jakarta-Cikampek South Toll Road, Probawang Toll Road, Nambo Regional Waste Management, West Semarang Water Supply, dan Makassar-Parepare Railway.

Ikmal menuturkan infrastruktur perlu terus digenjot lantaran mempengaruhi roda perekonomian, terutama investasi. Pembiayaan dari pihak swasta menjadi jalan alternatif agar proyek bisa berjalan dengan cepat. Adapun apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kata Ikmal, akan butuh waktu yang sangat lama untuk merealisasinya karena keterbatasan dana.

Selain terkait dengan anggaran, kata Ikmal, dengan keterlibatan pihak swasta, pemerintah diha-

rapkan mampu menyerap teknologi dan kemampuannya. Menurut dia, badan usaha swasta selama ini biasanya memiliki kapabilitas etos kerja yang lebih baik ketimbang pemerintah. "Untuk mempercepat target, BKPM akan terus mempercepat *market sounding* serta tetap mencari masukan. Itulah kelayakan di sektor KPBU dan swasta," ujarnya.

Kepala Subdirektorat Pemerintah Swasta Direktorat Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dadang Jusron, menuturkan semua pihak bisa menjadi subyek kerja sama dengan skema KPBU selama memiliki kemampuan. Adapun obyek kerja sama yang bisa masuk ke skema ini ada 19 jenis infrastruktur, baik di bidang ekonomi maupun sosial. "Ini yang kami tawarkan kepada kementerian atau pemerintah daerah kalau ingin menggunakan KPBU, pastikan masuk ke sektor ini," ucapnya.

Untuk menarik investor, kata Dadang, pemerintah akan berkontribusi pada setiap proyek yang direncanakan, antara lain dengan mengoptimalkan keterbatasan dana yang

ada serta dukungan lewat beberapa fasilitas. Selain itu, pemerintah akan menjamin keberlangsungan kerja sama lewat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). "Atas risiko politik yang menyebabkan ada perjanjian kerja sama yang tidak dapat dipenuhi, maka PT PII yang akan menanggung kerugiannya," tuturnya.

Deputi Direktur Pengembangan Bisnis PT PII, Tanti Hidayati, mengatakan akan memberikan penjaminan kepada badan usaha atas proyek yang akan masuk ke KPBU. Dalam penjaminan, PT PII harus meyakinkan proyek tersebut layak secara teknis dan keuangan untuk memberikan kepercayaan kepada investor. Selain itu, perseroan akan menjamin adanya alokasi risiko yang berkeadilan antara pemerintah dan swasta, serta bantuan persiapan pendampingan transaksi proyek infrastruktur. "Kami bersama-sama mencoba memastikan proyek yang akan layak untuk skema KPBU, serta bisa dilakukan secara cepat," kata Tanti. Hingga saat ini, PT PII sudah menjamin 17 proyek lewat skema KPBU dengan nilai total proyek Rp 108,2 triliun. ●

Gotong-Royong

SEBANYAK 52 proyek infrastruktur disiapkan untuk dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Berikut ini rincian proyek yang akan digarap secara gotong-royong di

TAHAP OPERASI

Nilai proyek: US\$ 87,6 juta

WEST PALAPA RING

TAHAP KONSTRUKSI

Total nilai proyek: US\$ 8,82 miliar

- Manado-Bitung Toll Road
- Balikpapan-Samarinda Toll Road
- Pandaan-Malang Toll Road
- Batang-Semarang Toll Road
- Serpong-Balaraja Toll Road
- Cismudawu Toll Road
- Serang-Parimbang Toll Road
- Umbulan Water Supply
- Bandar Lampung Water Supply
- Central Java Power Plant
- Central Palapa Ring
- East Palapa Ring

TAHAP TRANSAKSI

Total nilai proyek: US\$ 4,4 miliar

TANDA TANGAN KONTRAK

- Jakarta-Cikampek South Toll Road
- Probawang Toll Road
- Nambo Regional Waste Management
- West Semarang Water Supply
- Makassar-Parepare Railway

PENGAJUAN PROPOSAL

- Multifunction Satellite

PRAKUALIFIKASI

- South Sumatera Non-Toll Road
- Semarang-Demak Toll Road
- Sidoarjo General Hospital
- Labuan Bajo Airport
- Gorontalo Hospital

TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

Total nilai proyek: US\$ 3,37 miliar

FINAL BUSINESS CASE (FBC)

- Riau Non-Toll Road
- Medan Municipal Transport (LRT)
- Patimban Port
- Baubau Port
- Hang Nadim Airport
- Pekanbaru Regional Water Supply
- Legok Nangka Regional Waste Treatment
- University of Sam Ratulangi Teaching Hospital
- Pirmjadi Hospital
- Indonesia National Cancer Center Dharmas Hospital

OUTLINE BUSINESS CASE (OBC)

- Trans Papua Road
- Yogyakarta-Bawen Toll Road
- Proving Ground BPLJSKB
- Surakarta Street Lighting
- National Integrated Welfare System
- Correctional Facility Relocation (Ciangir)
- Pasar Ciputat
- Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- Pengembangan Kampus Cirebon, Institut Teknologi Bandung

STUDI PENDAHULUAN

- Road and Bridge Central dan Western Sumatera Road Corridor
- Bridges in Trans Java Main Corridor
- West Papua Crossing Port
- Anggrek Port
- Kapet Kulon Progo Water Supply
- Development of Piyungan Sanitary Landfill
- Development of Jogja Agro Techno Park
- Tanjung Adikarto Fishery Zone

LARISSA HUDA | SUMBER: BAPPENAS (DATA PER 14 DESEMBER 2018)

Judul	Proyek Pengurai Macet Bekasi Terhambat Infrastruktur Nasional	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 31)		
Resume	Dua proyek untuk mengurai kemacetan di Kota Bekasi terpaksa tak bisa segera dibangun karena mesti menunggu pengerjaan proyek strategis nasional milik pemerintah pusat tuntas.		

Proyek Pengurai Macet Bekasi Terhambat Infrastruktur Nasional

Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur milik pemerintah pusat.



Jembatan Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, di atas tol Jakarta-Cikampek akan dilebarkan, kemarin.

Jobpie Sugiharto
jobpie@tempo.co.id

BEKASI – Dua proyek untuk mengurai kemacetan di Kota Bekasi terpaksa tak bisa segera dibangun karena mesti menunggu pengerjaan proyek strategis nasional milik pemerintah pusat tuntas. Kedua dua proyek tersebut adalah duplikasi jembatan (penambahan satu jembatan di samping jembatan yang sudah ada) di atas jalan tol Jakarta-Cikampek di kawasan Galaxi (Bekasi Selatan) dan di Pengasinan (Kecamatan Rawalumbu). “Kami menunggu proyek nasional itu selesai dulu,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Widayat Subroto, kemarin.

Menurut Subroto, instansinya bisa saja mulai menduplikasi jembatan bersamaan dengan pembangunan konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung asalkan dua proyek lainnya di lokasi yang sama telah selesai. Maka Bekasi

membutuhkan kejelasan lokasi proyek nasional tersebut. “Mereka harus mulai dulu proyeknya, baru kami menyesuaikan.” Perencanaan proyek dua jembatan, dia melanjutkan, bisa dimulai pada tahun depan agar pembangunannya dapat dimulai pada 2020. Dana yang dibutuhkan untuk setiap jembatan sekitar Rp 50 miliar. Sudah tiga jembatan tambahan yang dibangun, yakni jembatan tol Bekasi Timur yang selesai pada 2016 dengan anggaran Rp 65 miliar, jembatan Jatiwaringin (2017) dengan biaya Rp 50 miliar, dan jembatan Caman (2018) senilai Rp 46,5 miliar.

Ada tiga proyek strategis nasional di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek, yaitu jalur kereta ringan atau *light rail transit* (LRT) Jabodetabek di sisi utara tol, jalan tol Jakarta-Cikampek 2 *elevated* di media jalan tol, serta jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di sisi selatan tol. Baru LRT dan tol Jakarta-Cikampek 2 *elevated* yang penggarapannya mengalami kemajuan dan ditargetkan selesai

pada 2019 mendatang. Sedangkan proyek kereta cepat baru mencapai tahap penyelesaian pembebasan lahan, yang direncanakan kelar pada 2021. Subroto menuturkan bahwa proyek duplikasi jembatan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Jembatan yang ada sudah tak mampu menampung volume kendaraan yang melintas sehingga

menimbulkan kemacetan lalu lintas yang parah setiap hari.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari solusi untuk mengurangi kemacetan. Dia mencontohkan, setelah satu jembatan di Jalan Joyomartono sekitar tol Bekasi Timur dibangun, akan mengurai kemacetan

arus lalu lintas di Jalan Chairil Anwar dan Jalan Raya Jatimulya. “Arus lalu lintas tidak tersendat lagi akibat penyempitan jalan di jembatan,” ujar Yayan. Menurut Yayan, selain itu, dampak duplikasi jembatan Jatiwaringin mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Jatiwaringin menuju Kalimalang. Begitu pula jembatan di Caman yang baru diresmikan pada

awal pekan ini. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah memprediksi pengurangan kemacetan akut lalu lintas di 19 titik di Bekasi bakal selesai seluruhnya pada 2023. Titik kemacetan tersebut di antaranya berlokasi di tol Bekasi Barat, pintu tol Jatiwaringin, simpang Harapan Indah, simpang Pondok Ungu, simpang Alexindo, dan Jalan Raya Caman.

Titik macet lainnya adalah simpang Rumah Sakit Bella Bekasi Timur, Jalan Perjuangan, Jalan Ir H Juanda, simpang Kemang Pratama, Jalan Siliwangi-Pendawa, simpang Kom-sen-Jatiasih, putaran Pasar Pondok Gede, Superindo-Giant Galaxy, dan Jalan Cut Meutia. “Mayoritas kemacetan terjadi akibat *bottle neck*,” ujarnya pada 29 Januari lalu. “Beberapa titik di antaranya sudah kami selesaikan.” Menurut Rahmat, upaya mengurai kemacetan arus lalu lintas telah dilakukan oleh pemerintah daerah sejak 2013.

Sejumlah titik kemacetan sudah bisa terurai karena dibuat jaringan jalan baru berupa duplikasi jembatan layang, pembangunan jalan alternatif, serta perluasan badan jalan. Ketika itu, Rahmat tengah meresmikan duplikasi atau pengandaian jembatan layang Jalan Jatiwaringin dengan panjang 112 meter dan lebar 12 meter. ● **ADI WARSONO**

Macet Hingga 2020

Antrean kendaraan mengular menuju jembatan Pengasinan di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, kemarin. Kondisi serupa bakal terjadi hingga beberapa tahun ke depan sampai duplikasi jembatan di sana selesai dibangun. Lebar jembatan yang hanya sekitar lima meter membuat jalur penghubung wilayah Rawalumbu dengan jalur utama Kalimalang dipadati kendaraan alias macet. Petugas lalu lintas partikoler memanfaatkan kondisi itu untuk meraup pundi-pundi rupiah dari pengguna jalan yang ingin cepat-cepat meninggalkan jalur macet tersebut.

“Kami bantu-bantu agar lalu lintas ken-

daraan lancar,” kata Rizal Beken sambil mengatur arus lalu lintas.

Sedikitnya ada dua orang yang membantu mengatur lalu lintas, apalagi ketika volume kendaraan cukup padat. Bahkan sering dilakukan buka-tutup jembatan agar kendaraan dari dua jalur yang bertawanan bisa lancar melewatinya. Tak ada polisi di sana.

Kemacetan serupa sering terjadi di jalur jembatan Galaxi menuju Kalimalang. Jembatan ini termasuk yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk dilebarkan atau ditambah (duplikasi). Kalau tidak ada pelebaran, kemacetan panjang akan terus mengular hingga ke kawasan Galaxi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat pertumbuhan jumlah kendaraan terus terjadi setiap tahun. Sedikitnya sekitar 1,5 juta kendaraan di wilayah tersebut lalu lintas setiap hari. Maka dibutuhkan penambahan infrastruktur untuk mewa-dahi bertambahnya jumlah kendaraan.

“Infrastruktur sudah tak sesuai dengan kapasitas kendaraan sekarang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Yayan Yuliana, kemarin. Nyatanya, penambahan jembatan di Pengasinan, Rawalumbu, tak bisa segera dilaksanakan karena mesti menunggu tuntasnya proyek strategis nasional milik pemerintah pusat, seperti jalur LRT Jabodetabek, jalan tol Jakarta-Cikampek 2 *elevated*, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek LRT dan jalan tol layang ditargetkan rampung pada 2019.

● **ADI WARSONO**

Judul	Geliat Ekonomi Kian Merata	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Tol Trans Jawa dipastikan menumbuhkan ekonomi daerah. Saat libur panjang hari raya besar keagamaan, pemudik akan menggerakkan ekonomi daerah-daerah yang terlewati.		

Geliat Ekonomi Kian Merata

Tol Trans-Jawa dipastikan menumbuhkan ekonomi daerah. Saat libur panjang hari raya besar keagamaan, pemudik akan menggerakkan ekonomi daerah-daerah yang dilewati.



ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Presiden Joko Widodo, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, berfoto bersama setelah meresmikan pengoperasian tujuh ruas Jalan Tol Trans-Jawa di Jembatan Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (20/12/2018).

KENDAL, KOMPAS — Pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, tol penghubung Merak, Banten, sampai Surabaya, Jawa Timur, akan menarik antusiasme pemudik. Mereka tidak hanya melintasi tol itu, tetapi juga akan singgah ke sejumlah daerah untuk istirahat atau berlibur.

Pada hari-hari biasa, Jalan Tol Trans-Jawa akan mempermudah distribusi barang dan mendorong investasi. Tol itu juga akan menopang pertumbuhan pariwisata, kawasan industri, investasi, dan usaha kecil menengah (UKM) di daerah-daerah yang dilewati.

Pada Kamis (20/12/2018), Presiden Joko Widodo meresmikan empat jalur tol di Jawa Timur dan tiga di Jawa Tengah. Peresmian dilakukan di dua tempat, yaitu Simpang Susun Kilometer

671 Bandar, Jombang, Jawa Timur, dan di Jembatan Kalikuto di Kilometer 393, Kendal, Jawa Tengah.

Presiden menegaskan, infrastruktur tol yang rampung itu akan bermanfaat bagi perekonomian daerah. Arus mobilisasi orang dan barang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Untuk itu, integrasi dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan obyek wisata menjadi penting.

"Di Jawa Timur, Surabaya-Ngawi kurang lebih mungkin dua jam. Di Kabupaten Ngawi sudah banyak investor yang masuk. Sudah ada permintaan 20 hektar lahan untuk investasi. Di Caruban, Kabupaten Madiun, menurut laporan Pak Gubernur Jatim, sudah ada permintaan 400



BACA JUGA **HLM 2 DAN 3**

hektar, sedangkan di Nganjuk 200 hektar. Kalau ada investasi, artinya membuka lapangan pekerjaan," kata Presiden.

Perkuatan UKM

Menurut Presiden Jokowi, Tol Trans-Jawa juga bermanfaat untuk UKM karena mempermudah dan mempercepat penyediaan

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

klik.kompas.id/akhir2abad

KEBERAGAMAAN

Selembaar Kain Gandong Satukan Perbedaan

Frans Pati Herin

Lebih dari 10 perempuan berjalan memegang kain putih panjang sambil mengurung langkah rombongan sejumlah tokoh, di antaranya pendeta dan ustaz. Bunyi tifa yang dipukul beberapa pria berkelung salib berpadu dengan tepukan rebana oleh sekumpulan remaja berkopiah putih. Suara tifa dan rebana ini mengiringi langkah mereka menuju pelataran gedung Gereja Kristen Protestan Maluku di Desa Amahusu, Kota Ambon, Maluku, Minggu (2/12/2018).

Sambil melangkah, mereka menyanyikan lagu berjudul "Gandong". Lagu yang mengisahkan hubungan persaudaraan itu menjadi semacam pengikat rasa orang Maluku, yang hampir semua kampungnya terikat dalam hubungan pela dan gandong.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-5)

Judul	25 Bank Penyalur flpp Capai Target	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Pemerintah telah mengevaluasi kinerja bank-bank pelaksana penyalur kredit rumah subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, Hasilnya dari 43 bank pelaksana FLPP tahun 2018, 25 bank di antaranya akan kembali menyalurkan FLPP tahun 2019.		

25 Bank Penyalur FLPP Capai Target

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah mengevaluasi kinerja bank-bank pelaksana penyalur kredit rumah subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hasilnya, dari 43 bank pelaksana FLPP tahun 2018, 25 bank di antaranya akan kembali menyalurkan FLPP tahun 2019. Namun, belum ada rincian datanya.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan sekaligus Pelaksana Tugas Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Kamis (20/12/2018), menyebutkan, berdasarkan data penyaluran dana FLPP per 19 Desember 2018, dari 43 bank penyalur, 25 bank telah mencapai target penyaluran 70 persen atau lebih atau setidaknya 100 unit rumah. Sementara 18 bank lainnya masih di bawah 70 persen.

Oleh karena dinilai berkinerja baik, 25 bank itu diberi kesem-

patan untuk menandatangani perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Menurut rencana, penandatanganan digelar pada Jumat (21/12).

Sementara 18 bank lain diberi kesempatan menandatangani PKO untuk menyalurkan FLPP. Namun, PPDPP mesti mengevaluasi terlebih dahulu kesiapan dan keseriusannya. Evaluasi mencakup kesiapan, antara lain, soal sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dukungan teknologi informasi, dan program pemasarannya.

Apabila hasil evaluasi dan penilaian menunjukkan hasil yang baik, bank dapat melakukan tanda tangan PKO paling lambat April 2019. Dengan demikian, bank tersebut masih memiliki waktu untuk mengejar target penyaluran FLPP selama 3 bulan berikutnya.

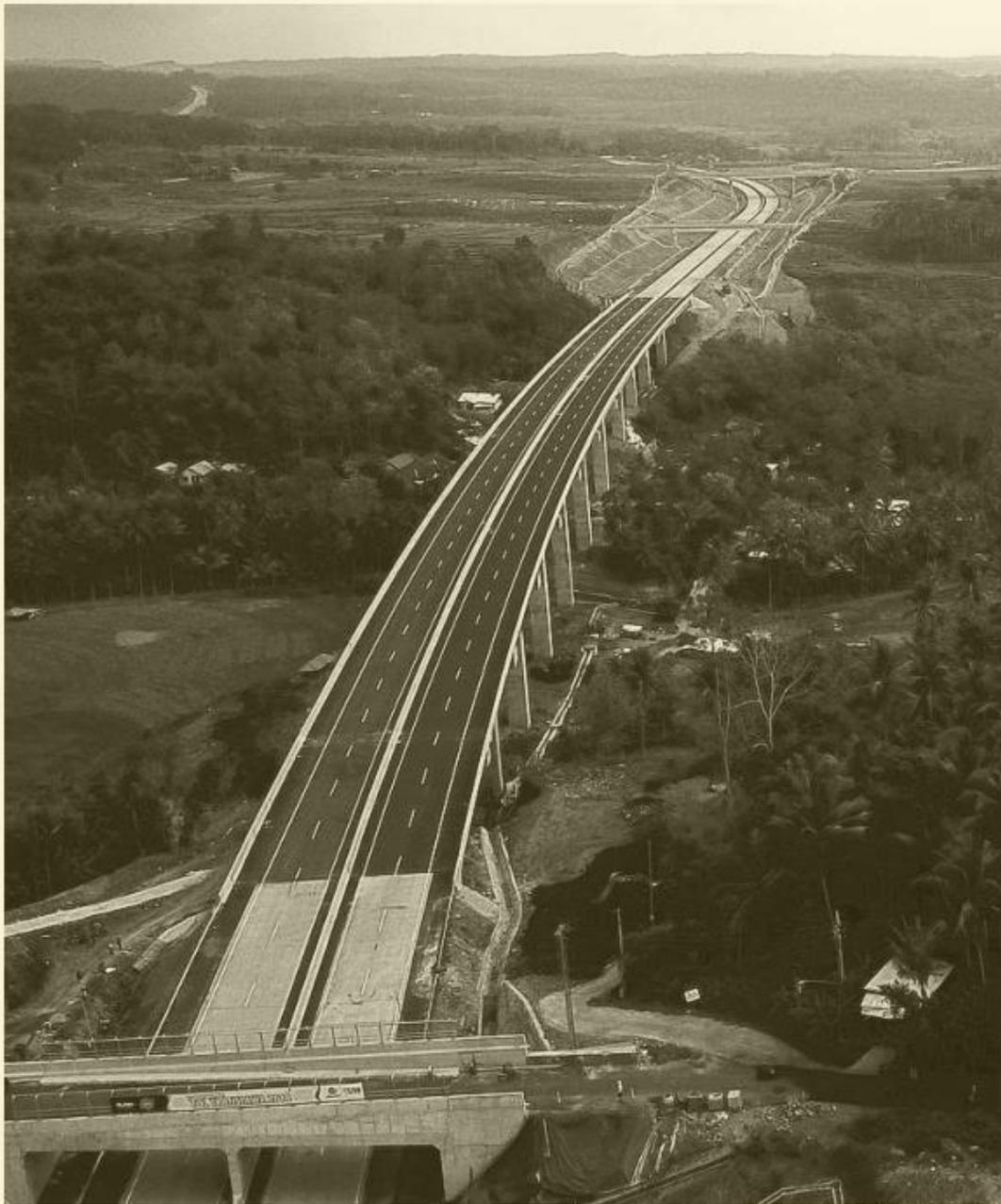
Secara terpisah, Direktur La-

yanan PPDPP Bimo Adi Nursanthyanto mengatakan, pada penyaluran FLPP 2018, pihaknya masih menunggu pengajuan dari bank paling lambat 24 Desember 2018 untuk pengujian berkas. Namun, pihaknya tetap akan memproses pengajuan bank setelah tanggal itu. "Itu ditagihkan pada anggaran 2019 dengan syarat akad harus dilakukan pada tahun yang sama," kata Bimo.

Direktur Konsumer Bank Tabungan Negara Budi Satria mengatakan, sampai 18 Desember 2018, BTN telah menyalurkan KPR bersubsidi sebanyak 225.934 unit dengan jumlah kredit Rp 28,07 triliun. Rinciannya, KPR berskema FLPP sebanyak 19.958 unit dengan jumlah kredit Rp 2,57 triliun dan KPR berskema subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 205.976 unit dengan jumlah kredit Rp 25,5 triliun. Tahun depan, BTN tetap menyalurkan KPR subsidi berskema FLPP atau SSB. (NAD)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman, 21)		
Resume	Tol Trans Jawa		

Tol Trans-Jawa



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Jembatan Kenteng di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari ruas Tol Salatiga-Kartasura, telah siap dilewati, Kamis (20/12/2018). Ruas tol sepanjang 32 kilometer tersebut merupakan salah satu bagian dari Tol Trans-Jawa yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, kemarin. Ruas tol tersebut akan dibuka untuk umum dan belum dikenai biaya hingga akhir Desember 2018.

Judul	Langkah Koreksi Menuju Pemulihan DAS	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 11)		
Resume	Langkah koreksi dilakukan karena RHL bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari persoalan besar berupa kerusakan DAS.		

Langkah Koreksi Menuju Pemulihan DAS

Langkah koreksi dilakukan karena RHL bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari persoalan besar berupa kerusakan DAS.



REVITALISASI SUNGAI CITARUM: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menanam pohon di kawasan Situ Cisanti di Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

GHANI NURCAHYADI
gva@medialindo.com

FENOMENA alam seperti erosi ditambah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab ikut menghasilkan lahan kritis di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan saat ini di Indonesia, terdapat 14,01 juta hektare (ha) lahan kritis.

Kekritisan lahan, menurut Siti, bisa dilihat dari kekritisian DAS di sekitarnya.

Lahan kritis menjadi salah satu penyebab terjadinya sejumlah bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Salah satu upaya dalam mengurangi dampak tersebut ialah dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), utamanya berupa penanaman pohon dan pembuatan bangunan penengah erosi dan sedimentasi.

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), KLHK IB Putera Parthama mengungkapkan, upaya pengendalian DAS dan RHL telah menjadi perhatian pihaknya sejak lama.

Sejak 2015-2017, pemerintah telah melakukan kegiatan RHL pada wilayah seluas 77.032 ha. Namun, KLHK menyadari perlu adanya langkah koreksi untuk mempercepat pemulihan DAS dan lahan kritis.

Langkah koreksi dilakukan karena RHL bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari persoalan besar berupa kerusakan DAS. Selain itu, lewat langkah koreksi juga ada perubahan paradigma soal rehabilitasi lahan yang lebih fokus pada luasan, bukan lagi soal jumlah tanaman/bibit yang ditanam.

"Dahulu kita ukur capaian, misalnya, dengan telah menanam 1 miliar pohon. Pertanyaannya, di mana saja 1 miliar pohon itu, menjadi hutan atau tidak, memperbaiki fungsi hidrologis suatu DAS atau tidak. Sekarang kita lebih ke berapa hektare yang sudah kita bangun di hutan," kata Putera.

Lewat langkah korektif ini, peran masyarakat pun akan lebih diintensifkan sejak fase perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari sisi penanaman, jenis pohon yang tidak mungkin ditinggal juga

akan diperbanyak dan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pihak swasta dan masyarakat pun makin didorong partisipasinya melalui pembuatan kebun bibit rakyat, penyediaan bibit gratis dari persemaian permanen, dan insentif lainnya. Di sisi kebijakan, juga disiapkan teknologi untuk akuntabilitas dan transparansi.

"Mulai 2019 dilakukan langkah koreksi, yaitu luasan RHL diperluas 10 kali lipat, menjadi 207 ribu ha, dan akan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 dam atau bendungan, dan kawasan rawan bencana. Jadi, tidak tersebar merata seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Putera.

Peningkatan luasan RHL pada 2019 diharapkan terus berlanjut di tahun berikutnya sesuai dengan rencana induk (masterplan) 2020-2030 yang sedang disusun KLHK. Meski demikian, Putera mengingatkan, keberhasilan rehabilitasi lahan kritis tidak serta-merta dapat menghilangkan bencana hidrologis seperti banjir.

"Hanya rehabilitasi lahan kritis saja tidak akan mence-



Target 2019



Membuat bangunan sipil teknis: **3.000** unit.



Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL): **207.000** hektare.

Bertujuan melindungi sejumlah daerah tangkapan air (DTA), yaitu sebagai berikut:

- DTA bangunan vital di 65 waduk/bendungan.
- DTA 15 danau prioritas.
- DTA 16 DAS prioritas.
- Kawasan rawan bencana.

Rehabilitasi di Dalam KPH dan DAS

Kegiatan	Sumber Dana APBN					
	2015	2016	2017	2018	Rencana 2019	Jumlah
1. Lahan Kritis di DAS Prioritas/ KPH/LH/DTA Danau/Sempadan Sungai/ Imbuhan Air Tanah/DTA Waduk	18.132	20.483	35.341	25.300	207.000	309.032
2. Mangrove	481	497	1.175	500	1.000	3.853
3. Hutan kota	240	215	468	-	-	923

Keterangan: KPH (Kawasan Pengendalian Hutan) DAS (daerah aliran sungai)

Sumber: Kementerian LHK

gah banjir karena itu akan tetap terjadi meskipun hulu sebuah DAS sudah kembali berhutan. Hal itu terkait daya tampung sungai yang berkurang. Jadi, kuncinya dengan adanya rencana pengelolaan DAS terpadu yang diacu seluruh sektor terkait dan pemerintah daerah dalam suatu DAS," ucap Putera. Berdasarkan analisis dampak yang telah dilakukan,

upaya RHL 2019 akan dapat menurunkan erosi sekitar 82,3 juta ton, memperbaiki kontinuitas, meningkatkan kualitas dan menjaga kuantitas air, menurunkan iklim mikro, meningkatkan karbon stok, serta menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana mandat tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/SDGs. Dampak lainnya ialah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serempak dan perlibatannya dalam RHL mulai pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Secara kelembagaan, RHL 2019 juga mendorong terbangunnya kelembagaan masyarakat yang mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti buah, getah, dan daun. "Sebagai gambaran, bila RHL 2019 seluas 207 ribu ha kami sisipkan dengan tana-

man matoa atau macadamia sebanyak 100 batang/ha, akan berpotensi meningkatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang sangat luar biasa. Untuk mencapai target itu, saat ini kami sedang siapkan perubahan regulasi, perencanaan di tingkat tapak dan T-1, penyusunan sistem informasi Sitarhuta, serta membangun sinergi dan partisipasi," tutur Putera. (S1-25)

Judul	Tol Trans-Jawa Pacu Ekonomi	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Media Indonesia (Halaman Utama)		
Resume	Tersambungnya Tol Trans Jawa dari Merak ke Surabaya bahkan hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah di dekat jalur bebas hambatan tersebut.		

INFRASTRUKTUR

Tol Trans-Jawa Pacu Ekonomi

TERSAMBUNGNYA Tol Trans-Jawa dari Merak ke Surabaya bahkan hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah di dekat jalur bebas hambatan tersebut.

Tol Trans-Jawa meningkatkan mobilitas orang dan barang sehingga menjadi lebih cepat, mudah, dan murah.

"Selanjutnya, kita dorong agar investasi masuk ke kawasan industri, baik yang pengembangan baru maupun lama. Dengan itu, lapangan kerja terbuka sebanyak-banyaknya," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan Tol Trans-Jawa di ruas Semarang-Batang tepatnya di jembatan Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, kemarin.

Presiden juga menginginkan adanya kawasan wisata terintegrasi dengan Tol Trans-Jawa sehingga memudahkan para pelancong yang hendak berkunjung.

Kemarin, Jokowi meresmikan tujuh ruas tol yang merupakan bagian dari Trans-Jawa. Ketujuh ruas itu meliputi tol Peralang-Batang seksi 1-2 (34 km), Batang-Semarang seksi 1-5 (75 km), Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura (33 km), Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono (38 km), Kertosono-Mojokerto segmen Bandar-Kertosono (1 km), Porong-Gempol segmen Porong-Kejapanan (6 km), dan Gempol-Pasuruan segmen Pasuruan-Grati (14 km).

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto memastikan ada penyesuaian tarif bagi ang-



RESMIKAN TOL TRANS-JAWA: Presiden Joko Widodo membantu Ibu Negara Iriana Joko Widodo menaiki podium, disaksikan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno saat meresmikan ruas Tol Trans-Jawa di Interchange Bandar Km 671, Jombang, Jatim, kemarin.

kutan logistik yang melintasi Tol Trans-Jawa dengan jarak tempuh panjang.

Untuk jarak pendek, pada setiap ruas, penghitungan tarif disesuaikan nilai investasi. Se-

cara rata-rata, tarif yang dibayarkan Rp1.000 per kilometer. Namun, mungkin, skema hitungan itu tidak berlaku dalam jarak panjang terutama untuk angkutan logistik.

"Merak ke Surabaya itu sekitar 800 km, bukan berarti bayar Rp800 ribu. Awal bulan depan sudah ketemu rumusnya," ungkap Sugiyartanto. (Pra/FLX-3)

Judul	Tol Trans – Jawa Tidak akan bebani Pengusaha Logistik	Tanggal	Jumat, 21 Desember 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 15)		
Resume	Tol Trans Jawa kemarin telah resmi tersambung dari Merak, Jawa Barat, hingga Pasuruan, Jawa Timur. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto memastikan akan ada penyesuaian tarif bagi angkutan logistik yang melintasi tol dengan jarak tempuh yang panjang.		



DOK PU-PERA

PERESMIAN TOL TRANS- JAWA:

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono (kiri) menyampaikan sambutan saat peresmian pengoperasian tujuh ruas Tol Trans-Jawa di Jembatan Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, kemarin.

Tol Trans-Jawa tidak akan Bebani Pengusaha Logistik

TOL Trans-Jawa kemarin telah resmi tersambung dari Merak, Jawa Barat, hingga Pasuruan, Jawa Timur. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto memastikan akan ada penyesuaian tarif bagi angkutan logistik yang melintasi tol dengan jarak tempuh yang panjang.

Untuk jarak pendek, pada setiap ruas, penghitungan tarif akan menyesuaikan ni-

lai investasi. Secara rata-rata, tarif yang dibayarkan ialah Rp1.000 per kilometer (km). Namun, skema hitungan itu mungkin tidak akan berlaku dalam jarak panjang, terutama untuk angkutan logistik.

"Untuk perjalanan yang cukup jauh, misalnya dari Merak atau Jakarta ke Surabaya, nanti akan ada hitungan terpisah. Merak ke Surabaya itu sekitar 800 km, bukan berarti nanti kita

bayar Rp800 ribu. Bukan begitu," jelas Sugiyartanto saat ditemui di Jembatan Tol Kaliluto, Jawa Tengah, kemarin.

Ia mengatakan pemerintah sebagai regulator, bersama para badan usaha jalan tol (BUJT) tengah mencari rumus penghitungan tarif jarak jauh sehingga tidak membebani pengusaha.

"Kami sedang pelajari ini. Diharapkan, awal bulan depan sudah ketemu rumus-

nya. Kita bahas sama BUJT, tarif jarak panjang gimana, jarak pendek gimana," ucapnya.

Tol Trans-Jawa untuk pertama kalinya akan digunakan dalam melayani arus mudik pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

"Yang pertama dipakai untuk mudik, yang kedua tahun depan insya Allah dari Merak-Banyuwangi sudah (terhubung)," kata Presiden Jokowi se usai meresmikan Tol Trans-Jawa di Jembatan Tol Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, kemarin. Presiden berharap tol tersebut dapat memperlancar mobilitas barang, orang, dan logistik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. (Pra/E-25)